

## BAB II

### INDUSTRI PERFILMAN DI INDONESIA

#### 2.1 Historical Industri Perfilman di Indonesia

Industri perfilman Indonesia di mulai pada tahun 1900-an, masyarakat Hindia-Belanda mengalami perkembangan teknologi media massa seperti film, dan sebagainya. Film memiliki kemampuan dalam menggabungkan antara *audio* dan visual. Film pertama kali tayang di Indonesia yang dikenal sebagai gambar *idoep*. Pada saat itu, gambar *idoep* menjadi pusat perhatian masyarakat yang dapat membangkitkan emosinya secara utuh. Pada tahun 1910, industri film mulai memproduksi dokumentasi asal usul penjajahan Hindia-Belanda terkait profil kedudukan Belanda untuk pengenalan lebih dalam.

Pada tahun 1926, Indonesia mulai merilis produksi film yang berjudul *Loetoeng Kasaroeng* disutradarai oleh G. Krugers dan F. Carli (NV *Java Film Company*) tayang perdana di Bandung. Setelah 1 tahun, film tersebut masuk pada jam tayang di kedua bioskop ternama yaitu Bioskop Metropole (Jakarta) dan Bioskop Majestic (Bandung). Pada tahun 1927, NV *Java Film Company* memproduksi film kedua yang berjudul *Euis Atjih*. Bahwa kedua film tersebut memiliki jenis produksi yang berbeda mulai dari genre fantasi ke genre drama. Dengan hal ini, industri perfilman mengalami perkembangan secara meningkat dari segi *financial* serta kemunculan sinema lainnya yang semakin menguat dalam produksinya. Karena banyak diminati oleh kebutuhan audiens yang menjadi salah satu tempat hiburan mereka.

Bahkan, hal ini menjadi fenomena menarik bagi audiens hampir setiap bioskop selalu terisi penuh. Maka dari itu, industri lainnya mengikuti pembuatan produksi film dikarenakan kedua film tersebut memiliki peningkatan jumlah penonton yang dianggap cukup laku. Sebagian besar, industri media mengencarkan produksi film selanjutnya yang akan ditayangkan di bioskop. Diantarannya adalah film “Lily van Java” yang

diproduksi oleh Halimun Film Bandung serta film “Setangan Berlumur Darah” yang diproduksi oleh *Central Java Film*. Kedua film tersebut mengisahkan tentang kedudukan orang Cina, hal ini mengalami peningkatan jumlah audiens dalam pemasaran industri media.

Dengan ini, keturunan Cina memiliki kesempatan untuk mengikuti peluang bisnis industri film di Indonesia. Bagi orang Tionghoa, hal ini merupakan peluang besar dengan meningkatkan kreativitas dalam pembuatan film. Ketika produksi film dikaitkan dengan kedudukan Cina, itu akan menghasilkan keuntungan karena isi media tersebut cukup laku di pemasaran industri media. Salah satu industri media tampaknya ada yang memproduksi film tentang masyarakat Indonesia modern yaitu Tan’s Film. Tan’s Film didirikan oleh Toen Tan Koen Yauw pada tahun 1929. Produksi film yang berjudul “Njai Dasimah” yang mengarah pada perkembangan masyarakat pribumi. Film ini memiliki alur cerita yang berkesinambungan. Seiring berjalannya waktu, industri film tersebut menghasilkan film yang dinanti-nantikan oleh audiens yaitu film yang berjudul “*Pembalasan Nancy*” dirilis pada tahun 1930 (Said, 1982, pp. 20–21).

Pada saat itu, industri tersebut merilis film lainnya yang berjudul “*Melati van Agam*” yang ditayangkan dari akhir tahun hingga awal tahun 1931. Dari tahun 1929 hingga awal tahun 1931, industri media mengalami kualitas penayangan yang sangat kurang menarik karena film-filmnya tidak menggunakan suara/audio atau yang disebut dengan *silent film* (Prayogo, 2009, pp. 13–14). Seiring berjalannya waktu, industri film mulai didominasi oleh orang Tionghoa yang mengembangkan alur ceritanya, baik itu kedudukan ataupun pemeran yang ada di film-film tersebut. Industri film pemilik Cina dengan berbagai judul film sebagian besar berada di latar belakang negara Indonesia. Diantaranya adalah film *Si Poeng*, *Sinjo “Tjo” Main di Film*, serta *Indonesia Malaise*. Ketiga film tersebut diproduksi oleh Halimun Film yang mengisahkan tentang

kedudukan orang Cina (Kristanto, 1995, pp. 2–3).

Pada tahun 1931, industri film mulai menggunakan audio sehingga kualitas gambar dalam penayangan di bioskop-bioskop semakin meningkat. Hal ini merupakan kualitas yang terbaik dari sebelumnya. Namun sayangnya, beberapa industri film mulai ada yang gulung tikar pada tahun 1932, karena dari tahun ke tahun akan mengalami perkembangan. Akan tetapi, ada dua perusahaan yang masih bertahan. Diantaranya adalah The Tong Chung dan Wong Bersaudara. Secara perlahan perusahaan The Tong Chung menggantikan nama usahanya menjadi *The Java Industrial Film* pada tahun 1936.

Pada tahun 1937, orang Belanda mulai mendirikan perusahaan industri film di Indonesia yang bernama "*Algemeen Nederlandsch Indisch*". Albert Balink dan Manus Fraken berhasil mewakili orang Belanda sebagai pemeran film yang dibuat oleh Amerika. Karena tayangan film ini menampilkan adegan yang menegangkan serta menenangkan, seperti pemandangan alam yang indah; pemilihan lagu yang baik; pemeran filmnya terlihat tampan; serta adanya perkelahian yang mengalami penderitaan rakyat. Bila film ini menampilkan peran utama yang rupawan maka jenis program tersebut akan menjadi dominan bagi audiens yang dapat mempengaruhi peningkatan rating. Sebagaimana pemeran tersebut akan menjadi panggung sandiwara dalam dunia industri perfilman.

Di masa Jepang, banyak propaganda yang bermunculan di industri perfilman seperti tidak mengizinkan produksi film Cina, akan tetapi produksi film impor lainnya diperizinkan untuk memutar filmnya. Maka dari itu, industri milik Cina beralih ke bisnis lain. Alat propaganda tersebut dinilai positif bagi pemeran lainnya karena mereka diperizinkan untuk bergabung dengan rombongan-rombongan sandiwara yang cukup mendapatkan fasilitas dari Jepang. Sebagaimana seniman muda mendirikan

forum sandiwara penggemar aktor Maya dengan menggali informasi untuk meningkatkan potensi pembuatan film.

Pada masa kemerdekaan, Indonesia sempat memberhentikan produksi serta pemutaran film karena adanya proklamasi kemerdekaan. Djamiludin Malik mengadakan acara Festival Film Indonesia (FFI) dimulai pada 30 maret sampai 5 april 1955, dalam rangka mempopulerkan industri film untuk mengawali kebangkitan semangatnya bangsa Indonesia. Acara ini bertujuan untuk memilih film yang berkualitas sebagai pemenang festival tingkat internasional diraih oleh film *Djam Malam* berhasil mewakili Indonesia di Asian Film Festival Singapore. Konten film tersebut mengisahkan tentang mantan pejuang yang kembali ke masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar. Film tersebut disutradarai oleh Usmar Ismail. Kemudian, perkumpulan industri film mendirikan organisasi yang bernama “Perusahaan Persatuan Film Indonesia” pada 30 Agustus 1954. Hal ini untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pada perkembangan produksi film (Iqbal, 2015).

Pada saat itu, film impor banyak yang tayang di bioskop Indonesia yang menjadikan film Indonesia sendiri mengalami penurunan jumlah audiens. Bahkan posisinya berada di kelas pertama memiliki kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan film Indonesia. Pada tahun 1960, film Indonesia sempat berhenti dalam melakukan persaingan film antar negara, karena ini hal yang sulit bagi mereka. Jumlah produksi film sendiri masih sedikit serta kualitasnya masih belum sepadan dengan film impor lainnya. Maka dari itu munculnya kapitalisasi industri perfilman antar negara, baik secara politik maupun ekonomi.

## **2.2 Kapitalisasi Industri Perfilman**

Pada pembahasan sub-bab sebelumnya, festival film Indonesia di tahun 1955 tidak dilanjutkan kembali. Karena hal ini berdampak pada film Indonesia sendiri karena

jumlah audiens semakin berkurang, akibat masuknya film impor yang tayang di bioskop Indonesia. Pada tahun 1960, film Indonesia sempat berhenti dalam melakukan persaingan film antar negara, karena ini hal yang sulit bagi mereka. Jumlah produksi film sendiri masih sedikit serta kualitasnya masih belum sepadan dengan film impor lainnya. Indonesia tampaknya mengalami tekanan politik serta ekonomi dalam kapitalisasi industri perfilman yang mengakibatkan perselisihan antar negara. Ekonomi politik media melibatkan konsep Marxisme klasik sampai batas tertentu karena memiliki satu arah dalam mendistribusikan isi konten film untuk mempengaruhi opini audiens.

Produksi film memberikan konten media sebaik mungkin untuk mengutamakan narasi secara konsisten karena hal ini sangat penting dalam mengorbankan perspektif yang lebih bernuansa. Ini menjadi isu pertama dalam memproduksi film terkait ekonomi politik dalam media, karena akan mempengaruhi opini audiens yang membentuk sebuah wacana. Sebagaimana isi konten media tersebut memberikan pandangan yang lebih luas terkait dengan konteks ekonomi, politik, serta teknologi. Hal ini merupakan bentuk komoditas dalam nilai jual di pasar industri perfilman, sehingga film lainnya termajinakan oleh dominasi saluran media. Upaya menghasilkan keuntungan dari akumulasi pendapatan dalam produksi film (Fuchs & Mosco, 2015, pp. 69–70). Ini sebagian dari bisnis kapitalis media yang diprivatisasi oleh industri film. Kapitalis saat ini masih mendominasi industri film yang menyebarkan unsur konstruksi sosial yang tidak adil bagi kaum minoritas, ini sebagai alat produksi utama dalam media (Sunarto, 2009, p. 44).

Alat produksi utama ini menjadi kekuatan intelektual yang berkuasa di dalam industri media. Dengan cara seperti ini, media akan menghasilkan dominasi ideologi golongan atas yang didapatkan dengan memanipulasi media terhadap gambar serta

simbol untuk keuntungannya (Littlejohn & Foss, 2014, p. 433). Kelompok tersebut akan membangun sebuah ide terkait relasi materialisme. Materialisme mengacu pada konsep Karl Marx yang memiliki dua macam yaitu materialisme historis serta materialisme dialektis. Dengan adanya materialisme, kehidupan intelektual manusia akan ditentukan oleh kondisi sosial yang dapat memenuhi kebutuhan material. Situasi ini ditandai dengan adanya transformasi global untuk membantu mengembangkan eksistensi pada faktor ekonomi yang akan menentukan kelas sosial. Hal ini menciptakan ketidakadilan gender khususnya wanita.

Secara tidak langsung kelompok borjuis mengeksploitasi wanita untuk berkontribusi dalam produksi film yang mengarah pada unsur patriarki dikuasai oleh kekuatan kapitalis. Isi media merupakan komoditas yang dijual dipasar dengan menghasilkan keuntungan seperti adanya penindasan serta ketidakadilan terhadap kaum minoritas (Farihah, 2015, p. 435). Tindakan tersebut dikendalikan oleh kaum borjuis dengan mempengaruhi kenaikan harga, mereka tidak dapat dikendalikan langsung dari kehidupan manusia itu sendiri. Menurut Harvey (Fuchs & Mosco, 2015, p. 234) mengatakan bahwa *market forces, which none of us individually control, regulate us.*

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa industri media di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup menjanjikan tentang perkembangan produksi film. Saat ini, produksi film memiliki kualitas gambar yang lebih baik dari sebelumnya serta peningkatan jumlah audiens. Karena industri film lebih cenderung mengekspos ketertindasan dalam penggambaran stereotipe seperti martabat wanita yang sering direndahkan serta dinomorduakan oleh sistem sosial. Selain itu, mereka dijadikan sebagai objek pandangan atau alat pemuas nafsu, semata-mata mereka hanya menghasilkan reproduksi anak. Mereka juga dianggap tidak penting bagi politik yang

mudah termarginalkan oleh kelompok sosial (Fakih, 2013, p. 12).

Industri film mengutamakan konten tentang ideologi sosial terkait dengan tradisi patriarki. Ini menjadi hal yang baru bagi industri media karena masuk pada modal *venture capital company*, beberapa produksi film berhasil mendapatkan tambahan bonus dari sistem kapitalis di dunia perfilman. Hal ini akan menjadi tantangan bagi produksi film karena memiliki keragaman konten seperti genre drama, komedi, serta horor yang telah mendominasi bioskop Indonesia dari periode 2017 hingga 2018. Lebih dari seratus judul film Indonesia semakin meningkat positif dalam perkembangan kapasitas produksinya. Berdasarkan data yang dikumpulkan film Indonesia tahun 2018 memiliki persentase meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 24,02% (Jayani, 2021). Genre yang banyak diminati oleh audiens adalah genre horor dengan persentase sebesar 12,3% sedangkan genre lainnya lebih rendah dari genre horor.

Ketika film Indonesia merilis genre horor justru isi kontennya akan mengarah pada unsur komedi serta seksual. Film seluruhnya tidak terus menerus ditampilkan sebagai edukasi, bahkan dapat memberikan inspirasi kebaikan untuk memperkuat karakter bangsa dalam hiburan mereka, selain itu berfungsi sebagai legitimasi liberalisasi. Seperti dalam perjuangan wanita untuk memperoleh hak kebebasan serta keadilan bagi korban diskriminasi atau pelecehan seksual, hal ini didasarkan atas relasi gender terkait feminisme liberal. Tampaknya Indonesia mengadopsi produksi film yang bergenre *western* mengarah pada kehidupan Amerika tahun 1800-an (imdb.com, 2017). Produksi film tersebut adalah “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” disutradari oleh Mouly Surya mengangkat tentang alur cerita yang berjenis *satay western*.

Film ini mengisahkan tentang peran perempuan yang jauh dari permukiman di wilayah Sumba, NTT. Karena peran wanita memiliki tolak ukur yang berbeda dari perempuan pada umumnya, disini menampilkan tindakan *powerful* ketika mengatasi

kejadian tersebut yang menjadi seperti kepribadian maskulin. Bahwa misi ini sepenuhnya diatasi oleh perjuangan wanita yang memberanikan diri keluar dari akar ketertindasannya. Lembaga birokrasi hukum dan politik tidak berpihak kepada korban diskriminasi maupun pelecehan seksual. Bahkan tidak ada dukungan dari siapapun selain sesama wanita. Secara tidak langsung, mereka bertindak rasional dengan melalui kekerasan fisik ini adalah salah satu senjata untuk terlepas dalam mengakhiri kejadian tersebut, mereka pun berhasil membebaskan diri dari kelompok kejahatan. Dengan cara seperti ini, mereka dapat bertahan hidup untuk mendapatkan hak yang seadil-adilnya karena tujuh perampok tersebut telah merebut harta, tahta, serta kehormatannya.

Di sisi lain film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” telah menampilkan unsur sistem sosial di Indonesia masih berpegang teguh dalam tradisi patriarki yang mengarah pada penindasan wanita karena terabaikan oleh lembaga birokrasi hukum. Hal ini merupakan bentuk ketidaksetaraan gender karena telah menciptakan perselisihan antara laki-laki dengan wanita. Sebagian besar produksi film telah merugikan wanita, karena seringkali menjadi korban serta *bias* gender yang mendapatkan perlakuan *blamming the victim* oleh audiens. Sebagaimana korban tetap dipersalahkan sedangkan pelaku dibela (Sunarto, 2009, p. 5). Bahwa status laki-laki diutamakan dalam sosial yang mendominasi berbagai aspek kehidupannya. Maka dari itu, film ini berusaha mengangkat isu feminisme untuk meningkatkan martabatnya karena tidak selamanya lemah yang dapat dilecehkan oleh laki-laki jahat. Hal ini banyak diminati oleh audiens karena menginspirasi berbagai asumsi tentang kekuatan wanita dalam mengatasi kejadian tersebut. Maka dari itu, film lainnya pun mengikuti alur cerita yang mengangkat tentang isu feminis baik di dalam maupun luar negeri yaitu “Ayat-Ayat Cinta 2008”, “Kartini 2017”, “Yuni 2021”.

Bahwa film-film tersebut mengarah pada aksi penindasan sosial, kekerasan KDRT,

serta pendidikan khususnya terhadap wanita. Tindakan kekerasan tersebut akan mengacu pada konflik perselisihan gender, hal ini sebagai bahan produksi film dalam nilai moral sosial bagi audiens. Bila karakter perannya mendukung di dalam film tersebut maka akan berhasil untuk membentuk pola pikir audiens seperti bagaimana penggambaran wanita dalam media yang akan membentuk makna pesan-pesan media. Pada saat itu, film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” mendapatkan rating 7,0/10 di situs IMDb. Sementara di situs *rottentomatoes.com* memberi data persentase sebesar 98%. Bahwa film tersebut berhasil memenangkan lebih dari 19 penghargaan diantaranya adalah Asian World Film Festival (AWFF) di California; *Snow Leopard Special Jury Award* di AWFF 2018; NETPAC di Five Flavours Asian Film Festival 2017, dan sebagainya.

Selain itu, film ini sangat populer di dunia Internasional. Situs IMDb juga memaparkan total pendapatan filmnya dalam nilai harga *worldwide* sebesar \$26,331 atau setara dengan Rp. 377.482.532,55. Ini memiliki penghasilan yang cukup banyak dalam satu produksi film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak” yang merepresentasikan isu feminisme terkait perjuangan perempuan dalam melawan adanya budaya patriarki demi mendapatkan hak-haknya. Sebagian besar film seringkali menganggap bahwa wanita sebagai objek kedua, mesin, stok produk, serta pekerjaan domestik. Wacana wanita akan menjadi pusat perhatian audiens yang sering mendapatkan perilaku diskriminasi pada kesenjangan sosial.

Hal ini berdasarkan atas sistem patriarki yang menciptakan berbagai stereotipe tentang wanita. Celaknya stereotipe ini seringkali merugikan serta mengarah pada ketidakadilan sosial terhadap kaum minoritas. Ketika wanita berdandan masyarakat pun lebih cenderung menyalahkan penampilannya karena dianggap menarik perhatian lawan jenis untuk meningkatkan hawa nafsu laki-laki. Karena setiap kali ada kasus

kekerasan atau pelecehan seksual, hal ini melibatkan tentang asumsi-asumsi yang mudah disalahgunakan oleh kesenjangan sosial untuk membentuk serta memperkuat nilai-nilai tentang perempuan, terutama lembaga birokrasi hukum maupun politik (Fakih, 2013, p. 17).

### **2.3 Perkembangan Feminisme di Indonesia**

Perkembangan feminisme di Indonesia didasarkan atas gerakan wanita memperjuangkan hak-hak yang semestinya didapatkan untuk melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial. Hingga saat ini, gerakan feminisme masih tetap berkembang tergantung dengan seiring perubahan kondisi sosial. Karena dapat mempengaruhi pandang masyarakat terhadap asumsi *historis* yang menimbulkan adanya ketertindasan terhadap wanita, maka hal ini layak diperjuangkan oleh kaum feminis. Supaya terlepas dari ancaman kejahatan yang kerap kali terjadi pada wanita. Dari zaman prakolonial hingga era reformasi terdapat organisasi-organisasi terkait dengan gerakan wanita demi meningkatkan kesadaran serta kesejahteraan nasional (Prakasa, 2020).

Selain itu, organisasi feminisme bermanfaat bagi perjuangan wanita untuk memperoleh haknya dengan memberikan motivasi positif. Sehingga perkumpulan pemuda wanita Indonesia memiliki wawasan yang lebih kompleks dalam meningkatkan kesadaran sosial (Ohorella et al., 1992, p. 1). Hal ini merupakan bentuk emansipasi wanita dari berbagai aspek kehidupan seperti dalam bidang pendidikan, politik, serta sosial. Secara tidak langsung, pemuda wanita Indonesia membangun sebuah organisasi gerakan wanita. Organisasi gerakan wanita yang pertama dimulai dari *Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)* didirikan oleh Poetri Mardika tahun 1912 di masa Presiden Soeharto.

Gerakan wanita Indonesia berasal dari ide besarnya RA Kartini. Karena ide itu datang dari tulisan-tulisan yang disampaikan untuk sahabatnya di Belanda, secara tidak

langsung ia bergegas untuk membuat sekolah kecil khusus wanita demi meningkatkan martabat wanita dari aspek kehidupannya terutama dalam bidang pendidikan. Karena pendidikan itu penting bagi wanita untuk memperluas wawasan yang lebih dalam supaya dapat mengubah perspektif sosial tentang kesetaraan gender (Hogan & Evans, 2020, pp. xiv–xv).

Hal ini didasarkan atas solidaritas wanita yang menciptakan berbagai edukasi tentang sistem pengetahuan sosial sehingga dapat mengembangkan dirinya dalam potensi keterampilan serta kreativitas untuk kepentingan mereka. Upaya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang dimiliki oleh wanita. Pada saat itu, kaum feminis juga menerbitkan berbagai artikel mengenai isu wanita pada sistem patriarki yang sering mendapatkan bentuk diskriminasi sosial.

Sebelum masa penjajahan Belanda, tampaknya perempuan memiliki status yang setara dengan laki-laki. Karena keberadaan wanita masih dijadikan sebagai Ratu oleh kerajaan Aceh yang diperintahkan untuk memimpin wilayah Indonesia dari tahun 1641 hingga 1699. Peperangan Belanda dipimpin oleh beberapa peran wanita, antara lain: Martha Christina Tiahahu (1800-1818); Cut Nyak Dien (1848-1908); Cut Meutia (1870-1910); Nyai Ageng Serang (1752-1838), mereka berani melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Pada saat itu, mereka kalah dalam peralatan senjata serta kurangnya alat komunikasi.

Penjajahan Belanda mengalami perubahan nama politik menjadi politik Etis. Politik Etis sebagai kebijakan Belanda yang berhutang budi kepada bangsa Indonesia karena telah mendapatkan kekayaan yang berlimpah, seperti sumber daya alam serta ketenagakerjaan masyarakat pribumi. Disisi lain, masyarakat pribumi sendiri mengalami kesengsaraan yang sering mendapatkan eksploitasi bangsa Belanda. Kebijakan politik etis untuk menyejahterakan masyarakat pribumi (Jovani, 2014, p.

23). Berdasarkan penjelasan diatas, pemuda perempuan Indonesia mulai mendirikan pergerakan organisasi wanita yang membentuk sejarah feminisme, antara lain:

Pada tahun 1912, Jawa Barat mulai mendirikan organisasi bernama “Keutamaan Istri”; Gerakan perempuan di Magelang mendirikan Pawiton Wanito pada tahun 1915; Wanito Hadi di Jepara (1915); Purborini di Tegal (1917); Wanito Susilo di Pemalang (1918); Wanito Rukun Santoso di Malang; Budi Wanito di Solo; Putri Budi Sejati di Surabaya; Wanito Mulyo di Yogyakarta. Serta pergerakan perempuan atas keyakinan Islam yaitu Sopo Tresno (1914); Aisyiah (1917); Sarikat Siti Fatimah di Garut; Wanodya Utomo di Yogyakarta (1925); Sarikat Putri Islam (1925) (Ohorella et al., 1992, p. 7).

Berdasarkan organisasi-organisasi tersebut mengarah pada perkumpulan perempuan Indonesia untuk meningkatkan potensi perempuan yang semakin berkembang pada kapasitas mereka seperti ketrampilan, kreativitas, serta baca tulis huruf Arab. Organisasi selanjutnya adalah pergerakan perempuan *Serikat Rakyat Istri Sedar* yang dipimpin oleh Suwardi Djojoseputro yang diperalatkan penjajahan Jepang untuk mengutarakan teguran yang keras terhadap pemerintah Belanda karena hal ini didasarkan atas perlawanan terhadap sistem kapitalisme. Upaya dapat memperbaiki kaum perempuan di kalangan proletariat. Selain itu, Organisasi tersebut didirikan untuk melakukan perdebatan tentang melawan adanya isu poligami yang termasuk bentuk kekerasan rumah tangga terhadap perempuan.

Namun pada saat itu, penduduk Jepang mendirikan organisasi pergerakan perempuan di Indonesia yang dibentuk oleh Pasukan Srikandi bernama “*Fujinkai*”. Organisasi tersebut mengarah pada ketenagakerjaan perempuan dengan melakukan pelayanan kesehatan serta pemberantasan buta huruf untuk kesejahteraan seorang tentara Jepang di masa pertempuran Pasifik. Di saat itu juga, Jepang berhasil

memenangkan pertempurannya. Namun, organisasi ini dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 melalui kongres kedua.

Kemudian mereka bergabung pada Persatuan Wanita Indonesia (Perwari) yang bertujuan untuk mengarahkan tenaga perempuan serta melindungi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan memberikan bantuan daerah kepada Komite Nasional (KNI). Dari tahun 1946 hingga 1949, organisasi perempuan mengadakan kongres Indonesia kembali pada masa Belanda yang mengutarakan pada birokrasi hukum untuk memperbaiki perkawinan serta meningkatkan wawasan melalui pendidikan untuk perempuan. Pada tahun 1949, Indonesia berhasil mengalahkan peperangan Belanda.

Pasca Kemerdekaan-Orde Lama, satu persatu organisasi gerakan perempuan akan musnah. Sebagaimana organisasi Istri Sedar masuk ke dalam Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) berubah nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia yang dikenal sebagai feminis sosialis didirikan pada tahun 1950. Gerakan feminis sosialis bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dengan wanita, karena konsep Marxis lebih cenderung menindas wanita dalam aspek kehidupan sosial yang telah dikendalikan oleh kaum borjuis (Rahman, 2019, p. 1).

Di Masa Orde Baru-Era Reformasi, pergerakan organisasi wanita semakin berkembang dengan pengalaman isu feminis yang dihadapinya pada saat itu. Isu feminism saat ini masih belum terselesaikan sebagaimana wanita tetap dijadikan sebagai korban penindasan subordinat dalam struktur sosial. Hal ini masih berpegang teguh pada sistem patriarki bahwa wanita belum terlepas dari ancaman kejahatan sosial. Di beberapa Negara, perempuan telah berani melakukan demonstrasi menuntut hukum atas kesetaraan hak dengan laki-laki, namun di Indonesia perempuan belum berani melakukannya hingga saat ini. Selain itu, tingkat pendidikannya masih rendah dibandingkan dengan negara lain, terutama Amerika Serikat. Di sinilah terlihat bahwa

wanita mulai melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Saat itu, tingkat pendidikan ke perguruan tinggi masih belum terlaksanakan oleh Indonesia, sehingga gerakan feminisme untuk memperjuangkan wanita terkesan lebih lambat dibandingkan di negara lainnya.

Perubahan itu dilakukan secara perlahan hingga dapat mencapai misi feminisme dengan memperjuangkan sendiri. Semata-mata, wanita saat ini sedang memperjuangkan nilai feminisme melalui karya-karyanya seperti buku, serta *script* film yang tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Berusaha menyampaikan kepada audiens terkait makna pesan di dalam buku serta film yang berisi tentang perjuangan perempuan tanpa menimbulkan kerusuhan secara nyata di masyarakat. Seperti dalam film “Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak”, pembuat film ini hendak menyampaikan isu-isu feminisme terkait perjuangan wanita yang menolak adanya budaya patriarki, hal ini didasarkan untuk mengangkat kesetaraan gender.